

**PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA BUPATI
KABUPATEN PRINGSEWU**

(Tugas Skripsi)

Oleh

LAUDYA VELOVIA GUSTIRA

2456041031



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Paradigma diketahui sebagai kerangka berpikir atau orientasi filosofis yang menjadi dasar konseptual bagi peneliti dalam memandang, memahami, dan mengarahkan proses pelaksanaan penelitian. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2013), paradigma penelitian dipahami sebagai suatu kerangka berpikir yang berfungsi untuk membantu peneliti dalam menafsirkan serta memahami hubungan antar variabel yang menjadi fokus penelitian. Paradigma penelitian mencakup aspek-aspek seperti jenis dan jumlah pertanyaan yang akan dijawab, teori yang dijadikan dasar dalam penyusunan hipotesis, bentuk serta jumlah hipotesis yang diajukan, dan teknik analisis statistik yang digunakan dalam proses penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan paradigma positivisme yang memandang realitas sebagai sesuatu yang bersifat konkret, terukur, dapat dipahami, diklasifikasikan, serta memiliki hubungan sebab-akibat. Paradigma ini dipilih karena penelitian kuantitatif memungkinkan pengklasifikasian data ke dalam variabel-variabel tertentu, sehingga fokus penelitian dapat diarahkan pada variabel yang relevan saja.

Dengan demikian, metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data melalui instrumen penelitian, serta menganalisisnya secara statistik dengan tujuan menguji hipotesis dan menggambarkan fenomena yang dikaji (Sugiyono, 2013).

Dengan demikian, melalui paradigma positivisme dapat dibentuk hubungan sebab-akibat yang secara eksplisit maupun implisit berkaitan dengan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian kuantitatif juga

bersifat objektif dan bebas nilai, artinya penelitian ini tidak dipengaruhi oleh pandangan atau nilai-nilai subjektif baik dari peneliti maupun responden, sehingga hasilnya tetap netral dan terukur (Sugiyono, 2013).

3.2 Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti dalam mengkaji dan menganalisis fenomena yang diteliti. Berdasarkan tujuan dan karakteristik penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan kausal (sebab–akibat) antara variabel bebas, yaitu *peran media sosial (X)*, dengan dua variabel terikat, yaitu *transparansi (Y₁)* dan *akuntabilitas (Y₂)* Bupati Kabupaten Pringsewu.

Pendekatan kuantitatif berdasarkan pada filsafat positivisme, di mana realitas sosial dianggap objektif dan dapat diukur dengan menggunakan instrumen penelitian sehingga dapat menjelaskan pengaruh media sosial terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Data yang diperoleh berbentuk angka (data numerik) yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan metode survei (*survey research*) sebagai metode utama. Metode survei merupakan rancangan penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sampel populasi melalui penyebaran kuesioner untuk mengukur pendapat (Sihotang, 2023), persepsi, atau sikap responden terhadap fenomena sosial yang sedang diteliti.

Metode survei digunakan karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran empiris mengenai sejauh mana media sosial berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Responden dalam penelitian ini akan memberikan jawaban melalui skala pengukuran (Likert) yang telah disusun berdasarkan indikator variabel. Data yang

terkumpul kemudian dianalisis secara statistik untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh antar variabel.

Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan metode survei memberikan landasan ilmiah yang kuat bagi penelitian ini, karena mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat secara sistematis dan objektif. Pendekatan ini juga mendukung upaya peneliti dalam menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu bahwa media sosial berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas Bupati Kabupaten Pringsewu.

3.3 Metode Operasionalisasi Konsep

Metode operasional konsep dalam penelitian ini berfungsi untuk menurunkan kerangka teori ke dalam bentuk variabel yang dapat diukur secara empiris. Dengan pendekatan kuantitatif, konsep teoretis yang telah dibahas pada Bab II diterjemahkan menjadi variabel penelitian, kemudian dikembangkan ke dalam dimensi dan indikator yang dapat diukur melalui instrumen kuesioner. Proses ini memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan benar-benar merepresentasikan makna konseptual dari teori *Good Governance* dan *Governansi Digital* yang menjadi dasar penelitian ini.

Penelitian ini memiliki tiga variabel utama, yaitu Peran Media Sosial (X) sebagai variabel independen, serta Transparansi (Y_1) dan Akuntabilitas (Y_2) sebagai variabel dependen. Operasionalisasi konsep ketiga variabel ini didasarkan pada hasil sintesis dari teori dan penelitian terdahulu yang relevan di Indonesia.

Menurut Haryadi (2024), media sosial berfungsi sebagai sarana komunikasi publik yang mampu mempercepat penyebaran informasi, memperluas jangkauan pelayanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan. Media sosial memberikan ruang bagi interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memungkinkan terwujudnya komunikasi yang lebih terbuka dan akuntabel. Melalui studi literatur, Haryadi

menegaskan bahwa media sosial seperti Facebook dan Instagram telah menjadi media efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, Peran Media Sosial (X) dioperasionalkan melalui dimensi: keterbukaan informasi publik, interaktivitas komunikasi, partisipasi masyarakat, responsivitas pemerintah, serta kredibilitas dan konsistensi konten yang disampaikan.

Sementara itu, Mauni (2025) menyoroti bahwa penerapan teknologi informasi, termasuk *e-government* dan platform digital pemerintahan, berperan penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi publik secara terintegrasi meningkatkan efisiensi birokrasi, kemudahan akses informasi, serta pengawasan publik terhadap pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks ini, transparansi diukur melalui sejauh mana pemerintah menyediakan data yang akurat dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, sedangkan akuntabilitas tercermin dari kejelasan tanggung jawab, keterbukaan evaluasi, dan publikasi hasil kinerja secara daring. Berdasarkan pandangan tersebut, penelitian ini mengoperasionalkan Transparansi (Y₁) melalui dimensi aksesibilitas informasi publik, kejelasan dan akurasi isi data, ketepatan waktu penyampaian informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi publik.

Adapun variabel Akuntabilitas (Y₂) mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Nirwana (2023), yang menjelaskan bahwa media digital berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Akuntabilitas dalam konteks digital ditunjukkan melalui kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakannya kepada masyarakat secara terbuka melalui media daring. Hal ini meliputi publikasi laporan kegiatan, penyampaian hasil kinerja, tanggapan terhadap kritik masyarakat, serta komitmen pejabat publik dalam menjaga integritas dan konsistensi komunikasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akuntabilitas

dioperasionalkan melalui dimensi pertanggungjawaban publik, keterbukaan evaluasi, tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat, transparansi hasil kerja, serta integritas komunikasi publik.

Setiap indikator dari ketiga variabel tersebut kemudian diterjemahkan menjadi butir-butir pertanyaan dalam kuesioner penelitian. Untuk mengukur setiap indikator, penelitian ini menggunakan Skala Likert lima poin, dengan kategori:

- 1 = Sangat Tidak Setuju,
- 2 = Tidak Setuju,
- 3 = Netral,
- 4 = Setuju, dan
- 5 = Sangat Setuju.

Skala ini dipilih karena mampu mengukur persepsi dan tingkat kesepakatan responden terhadap pernyataan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui alur: Teori → Konsep → Variabel → Dimensi → Indikator → Instrumen (Kuesioner) → Data Empiris.

Dengan demikian, penyusunan metode operasional konsep ini tidak hanya berlandaskan teori *Good Governance* dan *Governansi Digital*, tetapi juga diperkuat oleh temuan empiris dari penelitian-penelitian terdahulu di Indonesia. Proses ini memastikan bahwa setiap indikator yang digunakan dalam penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat, relevan, dan sesuai dengan konteks pemerintahan daerah Kabupaten Pringsewu yang sedang bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian kuantitatif karena berfungsi memperoleh data yang sesuai dengan variabel dan

indikator yang telah ditetapkan dalam operasionalisasi konsep. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengukur secara empiris peran media sosial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Menurut Sugiyono (2013), pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif harus dilakukan secara sistematis dan terencana, menggunakan instrumen yang valid serta reliabel agar hasilnya dapat digeneralisasikan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan variabel, dimensi, dan indikator yang telah dijelaskan dalam metode operasional konsep, dengan menggunakan Skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi responden (Sihotang, 2023). Instrumen ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian kuantitatif yang berorientasi pada pengukuran sikap, opini, dan persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan di media sosial.

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Pringsewu yang aktif menggunakan media sosial, khususnya yang mengikuti akun resmi Bupati atau Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik *sampling purposive*, yakni penentuan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa responden dianggap memiliki pengalaman dan keterlibatan dalam penggunaan media sosial pemerintah.

Data primer ini mencakup persepsi responden mengenai keterbukaan informasi, interaktivitas pemerintah, aksesibilitas data publik, serta tanggung jawab pejabat publik dalam komunikasi digital. Data diperoleh melalui distribusi kuesioner secara daring (melalui *Google Form*) maupun secara langsung (tatap muka) guna memastikan representasi responden yang lebih luas.

2. Data Sekunder

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, laporan, dan publikasi resmi yang relevan. Sumber data sekunder meliputi laporan tahunan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, situs resmi Bupati Pringsewu, serta data statistik mengenai aktivitas media sosial pemerintah daerah.

Data sekunder juga mencakup hasil penelitian terdahulu, seperti penelitian Haryadi (2024), Mauni (2025), dan Nirwana (2023), yang digunakan sebagai dasar teoretis dalam merumuskan instrumen dan analisis hasil penelitian. Penggunaan data sekunder dalam penelitian kuantitatif berfungsi memperkuat konteks empiris dan validasi terhadap data primer yang diperoleh di lapangan.

Dengan mengombinasikan kedua jenis data tersebut, penelitian ini dapat menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana peran media sosial berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Data yang dikumpulkan kemudian diolah secara kuantitatif untuk dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.5 Metode Pengujian Data

Metode pengujian data dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan telah memenuhi kriteria kualitas, yaitu validitas dan reliabilitas, serta bahwa model analisis yang akan digunakan layak secara statistik. Pengujian ini penting untuk menjamin bahwa data yang diperoleh dari responden benar-benar mencerminkan konsep yang diukur dan dapat diolah lebih lanjut dalam analisis kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2013), uji kualitas data merupakan langkah awal dalam analisis kuantitatif untuk memastikan bahwa alat ukur memiliki tingkat ketepatan dan konsistensi yang tinggi. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipercaya dan digeneralisasikan. Dalam penelitian ini, pengujian data dilakukan

melalui tiga tahap, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik (jika menggunakan analisis regresi linear berganda).

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana setiap item pertanyaan dalam kuesioner mampu menggambarkan variabel yang diteliti. Validitas menunjukkan ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment, di mana setiap item dikorelasikan dengan skor total variabelnya.

Suatu item dinyatakan valid apabila nilai r -hitung lebih besar dari r -tabel pada taraf signifikansi 0,05. Semakin tinggi nilai korelasi item terhadap skor total, semakin baik tingkat validitasnya. Dalam konteks penelitian ini, uji validitas memastikan bahwa setiap indikator yang digunakan dalam mengukur variabel peran media sosial, transparansi, dan akuntabilitas benar-benar merepresentasikan makna konseptual dari variabel tersebut.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden terhadap kuesioner. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila memberikan hasil yang relatif sama ketika diujikan kembali dalam kondisi yang serupa. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, di mana nilai $\alpha \geq 0,70$ menunjukkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang baik.

Reliabilitas menunjukkan kestabilan hasil pengukuran dari waktu ke waktu dan kesesuaian antarbutir pertanyaan dalam satu variabel (Sihotang, 2023). Dengan demikian, uji reliabilitas memastikan bahwa kuesioner penelitian ini dapat memberikan hasil yang konsisten dalam mengukur persepsi responden terhadap variabel-variabel penelitian.

3. Uji Asumsi Klasik

Jika analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda, maka pengujian asumsi klasik perlu dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kriteria statistik yang baik (Sihotang, 2023). Uji asumsi klasik terdiri atas:

1. Uji Normalitas, untuk memastikan bahwa data berdistribusi normal. Pengujian dapat dilakukan dengan metode Kolmogorov Smirnov atau Shapiro–Wilk, dengan kriteria data normal apabila nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$.
2. Uji Multikolinearitas, untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antarvariabel independen. Model dinyatakan bebas multikolinearitas apabila nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 .
3. Uji Heteroskedastisitas, untuk melihat apakah varians residual bersifat konstan. Model dinyatakan bebas heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola tertentu pada scatterplot atau nilai Sig. $> 0,05$ pada uji Glejser.

Menurut Santoso (2024), uji asumsi klasik bertujuan memastikan model regresi memenuhi prinsip BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), yaitu model dengan hasil yang efisien, tidak bias, dan reliabel. Oleh karena itu, seluruh pengujian ini wajib dilakukan sebelum masuk ke tahap analisis data agar hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahapan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan agar dapat diinterpretasikan secara ilmiah dan menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data bertujuan untuk menguji hubungan atau pengaruh antarvariabel berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan melalui kuesioner. Menurut Sugiyono (2013), analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis analisis data, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial, dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi 26 untuk mempermudah perhitungan statistik dan pengujian hipotesis.

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan persepsi mereka terhadap variabel penelitian. Analisis ini dilakukan melalui perhitungan distribusi frekuensi, persentase, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi untuk setiap item pertanyaan dalam kuesioner.

Analisis deskriptif berfungsi menggambarkan kondisi data tanpa melakukan generalisasi atau pengujian hipotesis. Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini akan menunjukkan profil responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, serta intensitas penggunaan media sosial pemerintah daerah. Selain itu, analisis ini juga memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap tingkat keterbukaan informasi, interaktivitas pemerintah, serta transparansi dan akuntabilitas melalui media sosial.

2. Analisis Inferensial

Analisis inferensial digunakan untuk menguji hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Teknik analisis inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, karena terdapat satu variabel bebas (X) yaitu Peran Media Sosial, dan dua variabel terikat (Y_1 = Transparansi, Y_2 = Akuntabilitas).

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel independen terhadap lebih dari satu variabel dependen secara simultan maupun parsial. Persamaan umum model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

- Y = variabel dependen (Transparansi atau Akuntabilitas)
- a = konstanta
- b = koefisien regresi (tingkat pengaruh variabel independen)
- X = variabel independen (Peran Media Sosial)
- e = error (faktor kesalahan)

Untuk mengetahui hubungan tersebut, dilakukan pengujian sebagai berikut:

a. Uji Korelasi (r)

Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara variabel peran media sosial dengan transparansi dan akuntabilitas. Nilai koefisien korelasi (r) berkisar antara -1 hingga +1. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R^2 yang semakin besar menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap variabel dependen.

c. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap masing-masing variabel dependen. Variabel dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai Sig. $< 0,05$. Dengan demikian, uji ini akan menunjukkan apakah peran media sosial secara individual berpengaruh terhadap transparansi maupun akuntabilitas pemerintahan.

d. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap seluruh variabel dependen. Model dinyatakan signifikan apabila nilai Sig. $< 0,05$. Menurut Santoso (2024),

uji F digunakan untuk menilai kesesuaian model regresi secara keseluruhan (overall fit), sehingga dapat disimpulkan apakah model mampu menjelaskan hubungan antarvariabel dengan baik.

3. Interpretasi Hasil Analisis

Setelah uji statistik dilakukan, hasil analisis akan diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada teori Good Governance dan Governansi Digital yang telah dibahas pada Bab II. Interpretasi ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana peran media sosial berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Menurut Haryadi (2024) dan Mauni (2025), media sosial menjadi instrumen penting dalam menciptakan komunikasi publik yang terbuka dan akuntabel, karena memungkinkan interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, hasil analisis statistik akan digunakan untuk menguji sejauh mana fenomena tersebut juga terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

3.7 Keterbatasan Penelitian

Dalam setiap penelitian, selalu terdapat keterbatasan yang tidak dapat dihindari oleh peneliti, baik yang bersumber dari metode, waktu, maupun lingkup penelitian. Keterbatasan perlu diuraikan agar hasil penelitian dapat dipahami secara proporsional dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Menurut Sugiyono (2013), keterbatasan penelitian merupakan bentuk kesadaran ilmiah peneliti terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi validitas dan generalisasi hasil penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Lokasi dan Populasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan hanya pada masyarakat Kabupaten Pringsewu yang menjadi pengikut aktif akun media sosial resmi Bupati dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya

merepresentasikan persepsi masyarakat Pringsewu, bukan masyarakat secara umum. Perbedaan tingkat literasi digital, akses internet, serta pola partisipasi masyarakat di daerah lain dapat menghasilkan temuan yang berbeda. Seperti dikemukakan oleh Rahmawati (2022), keterbatasan lokasi dan karakteristik responden sering kali membatasi ruang generalisasi hasil penelitian sosial, terutama dalam konteks pemerintahan daerah yang memiliki heterogenitas sosial tinggi.

2. Keterbatasan Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner dengan skala Likert yang mengukur persepsi responden terhadap peran media sosial, transparansi, dan akuntabilitas. Karena berbasis persepsi, data yang diperoleh cenderung bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh kondisi psikologis, pengalaman pribadi, atau tingkat pemahaman responden terhadap topik penelitian. Menurut Santoso (2024), pengukuran berbasis persepsi memiliki potensi bias karena responden menilai berdasarkan pengalaman individu, bukan pengamatan empiris langsung terhadap kinerja pemerintah.

3. Keterbatasan Variabel Penelitian

Penelitian ini hanya meneliti tiga variabel utama, yaitu Peran Media Sosial (variabel independen), serta Transparansi dan Akuntabilitas (variabel dependen). Padahal, terdapat faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi transparansi dan akuntabilitas, seperti kepemimpinan digital, budaya organisasi birokrasi, dan dukungan kebijakan publik. Menurut Mauni (2025), penelitian administrasi publik dengan pendekatan digital governance sebaiknya mempertimbangkan variabel-variabel kontekstual yang dapat memperkaya model analisis. Oleh karena itu, keterbatasan ini membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel pendukung agar hasil analisis menjadi lebih komprehensif.

4. Keterbatasan Waktu dan Dinamika Media Sosial

Penelitian ini dilakukan dalam periode waktu tertentu, sehingga data yang diperoleh hanya menggambarkan kondisi pada saat penelitian berlangsung. Dinamika penggunaan media sosial yang sangat cepat berubah dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan strategi komunikasi pemerintah di waktu berbeda. Haryadi (2024) menegaskan bahwa kecepatan perubahan pola interaksi digital menuntut penelitian sosial untuk memperbarui data secara berkala agar tetap relevan dengan konteks faktual.

Meskipun terdapat keterbatasan-keterbatasan tersebut, peneliti telah berupaya meminimalkan dampaknya terhadap hasil penelitian dengan memastikan keandalan instrumen, validitas data, serta keterpaduan teori dan konteks empiris. Keterbatasan ini tidak mengurangi nilai ilmiah penelitian, melainkan menjadi dasar bagi peneliti berikutnya untuk memperluas ruang lingkup kajian, menambah variabel baru, atau mengombinasikan pendekatan kuantitatif dengan metode kualitatif agar pemahaman tentang peran media sosial dalam tata kelola pemerintahan dapat semakin mendalam dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryadi, A. T. (2024). Peran Media Sosial dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Publik. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 3342-3349.
- Sihotang, H. (2023). Metode penelitian kuantitatif. UKI Repository. <http://repository.uki.ac.id/13479/1/BukuMetodePenelitianKuantitatif.pdf>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV. feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf
- Mauni, C. (2025). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 104-115.
- Nirwana, N. (2023). PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA ONLINE DALAM KEGIATAN PEMERINTAHAN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT (Study pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Luwu Utara) (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Santoso, S. (2024). *Statistik parametrik untuk penelitian sosial*. Jakarta: Elex Media Komputindo.